

BAB II

IDENTIFIKASI DATA

1. Pergerakan Perempuan

Selama perjuangan dan pergerakan di Indonesia kelahiran gerakan feminis dan perjuangan untuk merdeka dari kekangan nilai masyarakat tradisional telah menyatu dengan kebangkitan nasional. Hal tersebut dikarenakan emansipasi individual menjadi perkembangan paling khas dari evolusi modern masyarakat Indonesia, melihat dari evolusi yang terjadi dimasyarakat kondisi perempuan di Indonesia seharusnya telah berubah secara menyeluruh.

Seiring evolusi di masyarakat, perempuan Indonesia makin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka. Perempuan Indonesia memahami bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dalam mendidik calon generasi masa depan. Mereka sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan agar dapat menjadi istri dan ibu yang baik. Dalam perkembangannya perempuan berfikir butuh Pendidikan bukan hanya untuk menjadi ibu dan seorang istri tapi untuk kepentingan diri sendiri sebagai senjata menghadapi lingkaran masyarakat yang masih berfikir konservatif tentang kewajiban – kewajiban yang dibebankan pada perempuan.

Ketika Kartini menulis tentang rasa tertindas yang ia alami sebagai perempuan Jawa dipenghujung abad ke -19, ia menyadari bahwa pembebasan bagi perempuan tidak mungkin terwujud tanpa perubahan pola pikir di kalangan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Bagi Kartini, pengusahakan kesetaraan bagi perempuan adalah bagian dari kerja pemberadapan suatu bangsa dan itu semata – mata tugas perempuan. Dari perenungan dan perbincangan dengan sahabat – sahabatnya,

Kartini percaya bahwa terwujudnya kebebasan untuk menentukan pilihan – pilihan pribadi, untuk menentukan nasib sendiri, merupakan pertanda kemajuan perempuan dan bangsa. Kelahiran gagasan – gagasan Kartini menandai titik awal pemikiran modern tentang hubungan antara kemajuan perempuan dan keadaban bangsa, serta peran perempuan dalam pergerakan kebangsaan.

Sepanjang 3 dasawarsa awal abad ke 20 perbincangan dikalangan perempuan terdidik terpusat pada upaya perumusan arti kemajuan dan keadaan bagi perempuan. Mereka bersama – sama mencari jalan tengah untuk menghadapi perubahan dunia, antara mendorong untuk perempuan keluar dari kungkungan adat dan dari pihak pihak yang belum bisa menerima perubahan zaman, apakah itu kaum feodal yang menginginkan perempuan tetap dalam posisi tradisional, ataupun para penguasa Belanda yang selalu berjaga – jaga agar perkembangan kaum bumiputra tidak berkembang kearah yang berlawanan dengan kepentingan dari mereka.

Pendirian organisasi perempuan pertama, Poetri Mardika, di Jakarta pada 1912 didorong oleh Boedi Oetomo. Demikian juga surat kabar perempuan pertama, *Poetri Hindia*, yang diterbitkan jurnalis R.M. Tirta Adhisoerjo di Bandung pada 1909, masih dipimpin dan diawaki laki-laki. Tiga tahun kemudian Roehana Koeddoes menerbitkan *Soenting Melajoe* (Bukittinggi) yang sepenuhnya dikelola perempuan. Dalam waktu kurang lebih 15 tahun organisasi- organisasi lain pun berdiri di berbagai kota. Kegiatan mereka kurang lebih sama: menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial bagi perempuan, memberi beasiswa kepada anak-anak perempuan yang berbakat, menyebarkan informasi tentang

pendidikan, dan menerbitkan mingguan untuk menyebarluaskan gagasan tentang kemajuan dan keadaban perempuan.

2. KOMNAS PEREMPUAN

Perkembangannya, perjuangan perempuan Indonesia belum juga usai. Banyaknya permasalahan – permasalahan yang timbul seiring waktu perubahan zaman yang semakin maju, juga semakin banyak permasalahan yang harus dihadapi perempuan Indonesia. Tidak mudahnya perempuan mendapatkan keadilan dan keadilan membuat perempuan Indonesia memperjuangkan kesetaraan hingga kini.

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah permasalahan Hak Asasi manusia yang dialami perempuan dalam kasus – kasus Konflik yang terjadi di wilayah – wilayah Indonesia. kasus kekerasan terhadap perempuan pada konflik – konflik yang terjadi antara lain konflik bersenjata di Aceh, konflik komunal di Poso, peristiwa 1965, Kerusuhan Mei 1998, penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, Konflik sumberdaya Alam Manggarai, NTT, dan Buyat, Sulawesi Utara, serta terkait kebijakan – kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, dan Konflik berkempanjangan di Papua. Perjuangan ini dipayungi oleh lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disebut KOMNAS PEREMPUAN.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui keputusan Presiden NO.181 tahun 1998, pada

tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Organisasi ini lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama perempuan pada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab Negara dalam menanggapi persoalan kekerasan terhadap perempuan.

3. Sejarah Lahirnya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

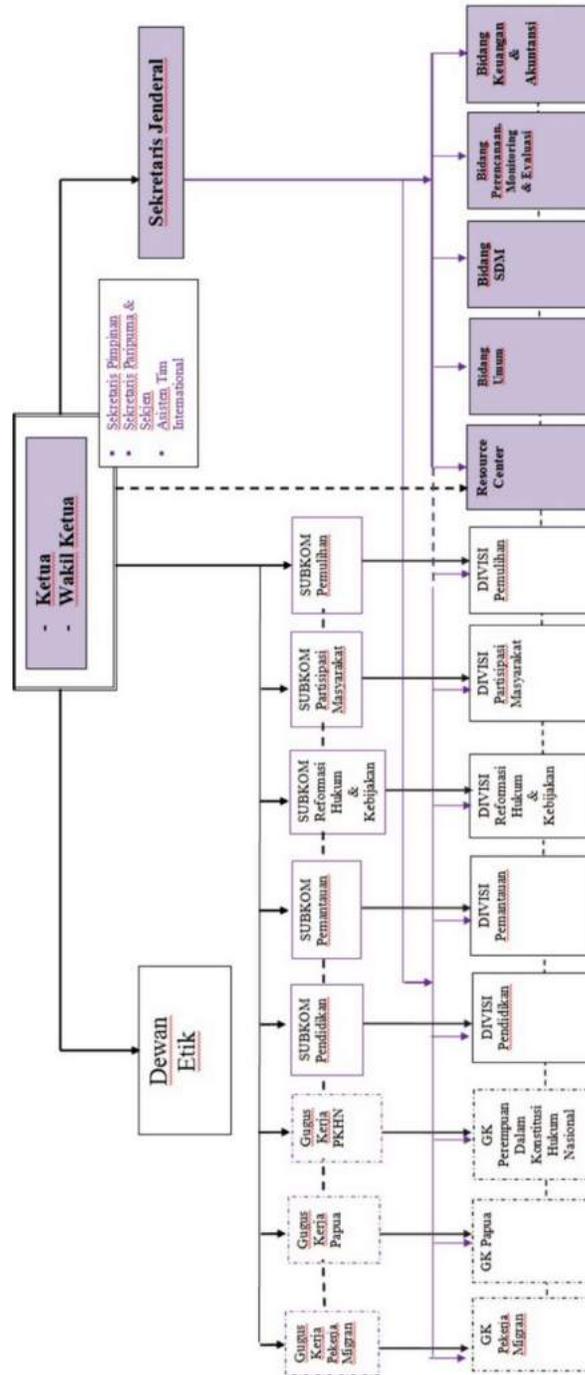
Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya – upaya penghapusan kekerasan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi Inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*.

. Gerakan “**16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**” tumbuh di Indonesia pada tahun 2001, dimana setelah kasus Mei 98 organisasi - organisasi berbasis perempuan dan gender mulai tumbuh, berkembang serta mendapat banyak dukungan. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya waktu tersebut karena merupakan simbolik yang menghubungkan dari kekerasan terhadap perempuan dan HAM.

Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan telah dimulai sejak tahun 2003. Dalam kampanye ini Komnas

Perempuan selain menjadi inisiator juga menjadi fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah – wilayah yang menjadi kemitraan dengan Komnas Perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja dan mandate yang diamanahkan kepada Komnas Perempuan yaitu bermitra dengan masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

4. Struktur Organisasi KOMNAS PEREMPUAN



Gambar 2.1 struktur Oraganisasi KOMNAS PEREMPUAN
 Sumber : www.komnasperempuan.go.id, 2020

5. Visi Misi KOMNAS PEREMPUAN

Memiliki tujuan dalam pergerakannya antara lain mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

6. Landasan Kerangka Kerja KOMNAS PEREMPUAN

- a) Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
- d) Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

7. Mandat dan Kewenangan

- a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;

- c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan
- d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan
- e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

8. Peran KOMNAS PEREMPUAN

- a) Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban
- b) Pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi perempuan
- c) Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan
- d) Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada

pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban

- e) Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

9. Kegiatan Kampanye

Setiap tahunnya kegiatan berlangsung selama 16 hari yaitu 25 November sampai 10 Desember. Rentang ini dipilih sebagai fokus kampanye, yang bertepatan dengan peringatan hari internasional penhapusan kekerasan terhadap perempuan (25 November) dan berakhir pada Hak Asasi Manusia. Pengaitan dua moment tersebut merupakan untuk mempertegas bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi. Kampanye yang dilakukan antara adalah :

a) Kampanye Publik

Kampanye Publik pada dasarnya adalah kampanye yang menggunakan media, pesan dan serangkaian aktifitas komunikasi untuk mencapai suatu hasil dan spesifik terhadap sejumlah masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kampaye ini menggunakan banyak medium yang dikoordinasi secara bersamaan untuk meraih hasil yang maksimal, diantaranya meggunakan media masa yang di gabung dengan komunikasi interpersonal maupun penggunaan media komunitas/rakyat untuk mencapai sasarannya. Kampanye public sering kali menggunakan banyak media agar mencapai

jangkauan yang luas dan tingkat frekuensi penyampaian pesan yang baik serta meningkatkan kemungkinan bahwa pesan tersebut dapat menimbulkan perubahan perilaku.